

**ANALISIS KEUANGAN MIKRO DAN JANGKAUANNYA  
TERHADAP MASYARAKAT MISKIN**

***ANALYSIS OF MICROFINANCE AND OUTREACH TO THE POOR***

**Zumi Saidah**

**Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor  
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680  
E-mail: zsaidah@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Provision of assistance in the form of microfinance services has been done and implemented in accordance with the purpose of helping to alleviate poverty. However, some literature review, it turns out the effect of microcredit on poverty varies and remains unclear. By performing the study of literature, this paper wants to know whether microcredit which has been implemented to help the poor out of poverty. Based on the results of a study of some of the literature, there are four perspectives that can describe about microcredit that range (outreach,), progress (progress), impact (impact) and access (access). This illustrates the four perspectives on key developments, challenges and the future direction of the financial institution. In essence, this article would like to provide information in order to produce the best policies available to microfinance.*

**Keywords :** *microcredit, the poorest, outreach, progress, impact and access*

**ABSTRAK**

Pemberian bantuan berupa layanan keuangan mikro sudah banyak dilakukan dan di implementasikan sesuai dengan tujuannya yaitu membantu mengentaskan kemiskinan. Namun dari beberapa tinjauan literature, ternyata pengaruh pemberian kredit mikro terhadap pengentasan kemiskinan bervariasi dan masih belum jelas. Dengan melakukan studi literatur, tulisan ini ingin mengetahui apakah kredit mikro yang selama ini dilaksanakan dapat membantu masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Berdasarkan hasil studi dari beberapa literature terdapat empat perspektif yang dapat menggambarkan tentang kredit mikro yaitu jangkauan (*outreach*), kemajuan (*progress*), dampak (*impact*) dan akses (*access*). Ke empat perspektif ini menggambarkan tentang perkembangan, tantangan dan arah masa depan dari lembaga keuangan. Pada intinya tulisan ini ingin memberikan informasi guna menghasilkan kebijakan terbaik yang tersedia untuk keuangan mikro.

**Kata Kunci :** kredit mikro, masyarakat miskin, jangkauan, progress, dampak dan akses

**PENDAHULUAN**

Layanan keuangan mikro selama ini diklaim sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Seperti banyak strategi pembangunan lainnya, strategi pembangunan yang ada kurang menembus strata yang lebih miskin dari

masyarakat miskin. Bentuk nyata dari masyarakat yang paling miskin adalah mereka tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan dan akses pendidikan, karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses ke keuangan mikro (*microfinance*). *Microfinance* merupakan singkatan dari *microenterprises finance* yang berarti pelayanan keuangan bagi usaha mikro atau dapat juga dikatakan sebagai jasa keuangan yang melayani masyarakat yang berpendapatan rendah. Robinson (2000) menjelaskan bahwa *microfinance* adalah layanan keuangan skala kecil khususnya kredit dan simpanan, bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, peternakan; perseorangan atau kelompok baik di pedesaan maupun di perkotaan di negara-negara berkembang. Mereka mengelola usaha kecil atau mikro yang meliputi kegiatan produksi, daur ulang, reparasi atau perdagangan.

Model layanan keuangan mikro (*microfinance*), telah berkembang di beberapa negara di dunia dengan hasil yang cukup signifikan. Dibanyak negara, keuangan mikro masih dipandang sebagai sektor marjinal yang memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat miskin, yang selama ini tidak tersentuh lembaga keuangan manapun. Melayani masyarakat miskin menjadi penting karena dengan adanya peningkatan taraf hidup kelompok masyarakat miskin akan mengeluarkan mereka dari kelompok miskin dan berpindah ke golongan masyarakat yang lebih sejahtera.

Masyarakat miskin pada umumnya membutuhkan layanan keuangan untuk memenuhi 3 (tiga) kebutuhan utamanya yaitu memenuhi siklus hidup (*life cycle needs*), memenuhi kebutuhan darurat (*emergency needs*), dan memenuhi kebutuhan untuk memanfaatkan peluang (*opportunity needs*). Selama ini lembaga keuangan mikro mengklaim bahwa dana bantuan yang diberikan dapat membantu yang orang miskin, namun hal tersebut belum tentu menjadi cara terbaik untuk membantu yang termiskin. Dengan adanya bantuan modal yang bisa membantu masyarakat miskin, maka pemerintah dan pemberi dana harus tahu apa yang menjadi kebutuhan utama dari pinjaman tersebut. Apakah pinjaman tersebut dipergunakan untuk mendapatkan bantuan kesehatan, bantuan pangan maupun bantuan uang tunai.

Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih menitikberatkan bentuk-bentuk transfer atau subsidi, padahal dalam rantai kemiskinan tidak selalu harus diatasi dengan cara tersebut. Aspek yang lebih penting adalah memutus mata rantai kemiskinan yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin agar menjadi lebih produktif. Pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif.

Agar dapat mencapai potensi keuangan mikro secara penuh dalam menjangkau sejumlah besar orang miskin, keuangan mikro harus menjadi bagian yang utuh dari sektor keuangan. Menurut Rajivan (2001), pemberian bantuan keuangan berupa program kredit mikro seringkali dipandang sebagai obat dari masalah kemiskinan. Program ini tidak hanya dijadikan instrument agar kelompok miskin mempunyai akses pada lembaga keuangan formal, tapi lebih lanjut telah menjadi suatu gerakan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Layanan keuangan mikro diharapkan juga mampu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga diharapkan meningkat karena penghapusan kendala kredit yang memungkinkan rumah tangga miskin dengan sedikit atau tanpa tabungan untuk memperoleh input produksi, termasuk teknologi untuk usaha mikro

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut, sebab sebagian masyarakat dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yang memiliki penghasilan namun terkadang tidak mencukupi. Namun pertanyaannya adalah apakah keuangan mikro yang ada saat ini merupakan alat atau strategi yang tepat untuk mencapai tujuannya yaitu mengurangi kemiskinan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka tulisan ini mencoba membangun kerangka teoritis tentang nilai sosial dari output layanan keuangan mikro berdasarkan kerangka kerja (*framework*) dengan melihat dari empat perspektif utama yaitu jangkauan, kemajuan, dampak dan akses.

### **LAYANAN KEUANGAN MIKRO (*MICROFINANCE SERVICE*)**

Hingga saat ini kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih banyak yang berpenghasilan rendah, sehingga mengakibatkan sebagian besar masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia 28,01 juta atau 10,86% pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13% (BPS, 2016). Oleh karena itu, perlu adanya sebuah lembaga yang mampu mengayomi masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya terutama dalam meningkatkan kondisi perekonomiannya. Lembaga keuangan tersebut harus mampu melayani, mengakomodasi dan menstabilkan kondisi perekonomian masyarakat miskin melalui pengembangan lembaga keuangan mikro.

Melalui pemberian layanan keuangan mikro sebagai elemen penting, meskipun sudah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan, namun bukan obat mujarab untuk menghilangkan kemiskinan. Tantangan utama bagi keuangan mikro untuk mencapai jalur yang berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan di Indonesia adalah pada

kemampuannya untuk: (a) meningkatkan jangkauan untuk orang yang lebih miskin, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan, masyarakat pertanian; (b) mengintegrasikan unit usaha mikro dengan pasar *mainstream*; (c) memastikan bahwa lembaga keuangan mikro yang menguntungkan dan pada saat yang sama mempunyai dampak dalam mengurangi kemiskinan kliennya; dan (d) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sistem keuangan formal.

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah serta masuk dalam lingkaran miskin, dan para pengusaha kecil atau mikro. Bentuk layanan keuangan yang diberikan bisa berupa pinjaman, pembiayaan usaha mikro dan pengelolaan simpanan. Bentuk lembaga keuangan mikro sangat beragam dan pada umumnya lembaga keuangan mikro ini berada di pedesaan.

Menurut Ledgerwood (1998), terdapat tiga jenis penyedia layanan keuangan mikro yaitu layanan keuangan formal, semiformal dan informal. Perbedaan utama diantara ketiganya adalah tingkat dimana lembaga ini diawasi oleh pihak eksternal. Lembaga keuangan formal memiliki aspek hukum yang berlaku dan diawasi oleh bank sentral, menteri keuangan maupun dinas terkait, sedangkan lembaga keuangan semiformal adalah lembaga yang terdaftar dan memiliki hukum yang relevan, tetapi biasanya tidak di bawah pengawasan otoritas perbankan atau lembaga keuangan. Dengan kata lain, lembaga keuangan ini mendapat izin dari pemerintah, tetapi diawasi oleh dewan direktornya, asosiasi atau pemangku kepentingan lainnya. Penyedia layanan informal umumnya tidak tercatat namun diakui oleh lembaga pemerintah dan hanya diawasi oleh anggota atau komunitas yang mereka layani.

Pada Tabel 1 berikut, terlihat bahwa layanan keuangan mikro pada umumnya dimanfaatkan oleh pihak seperti rumahtangga dengan golongan pendapatan menengah ke atas. Masyarakat yang berpendapatan rendah, lebih banyak bergantung pada pelayanan keuangan informal. Walaupun pada prinsipnya layanan keuangan mikro ditujukan bagi golongan miskin, tidak berarti pelayanan keuangan mikro tersebut sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh keluarga miskin. Pelayanan kredit sektor perbankan kurang menyentuh keluarga miskin, terutama karena adanya kewajiban memiliki agunan dan kelayakan usaha dalam pemberian kredit. Sementara itu, berbagai kredit program juga tidak seluruhnya dapat dinikmati keluarga miskin karena sebagian mulai menekankan aspek kemampuan membayar angsuran dan hal itu tidak mudah dipenuhi oleh keluarga miskin.

Tabel 1. Tiga Jenis Pokok Penyedia Layanan Keuangan Mikro

<b>Formal</b>	<b>Semi Formal</b>	<b>Informal</b>
Bank Umum	LSM	Model "Bank Desa"

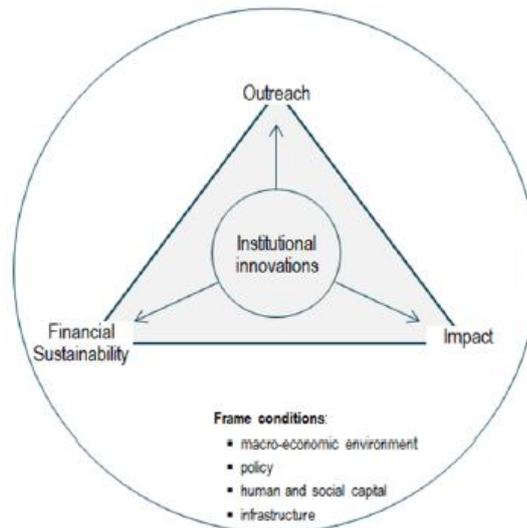
Bank Pembangunan	Koperasi Kredit (Credit Union)	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Bank Tabungan	Koperasi Simpan Pinjam	Asosiasi Jasa Keuangan (FSA)
Lembaga-Keuangan Bukan-Bank	Perusahaan Swasta	Arisan (ROSCA)
Perusahaan Pembiayaan		Arisan tidak bergulir (ASCA)
Perusahaan Sewa- Guna-Usaha (Leasing)		Kelompok Pemakaman
Perusahaan Asuransi		Rumah Gadai Pelepas Uang Perorangan

---

Sumber : Ledgerdwood (1998)

Agar bisa bertahan dan bersaing, Lembaga keuangan mikro harus mampu beroperasi secara efisien serta harus berusaha menjadi lembaga yang secara terus menerus mampu meningkatkan kinerja usahanya agar bisa bertahan dan bersaing di lingkungan masyarakat. Secara garis besar, lembaga keuangan mikro dapat dibagi atas empat perspektif utama yaitu jangkauan (*outreach*), kemajuan (*progress*), dampak (*impact*) dan akses (*access*). Ke empat perspektif ini menggambarkan tentang perkembangan, tantangan dan arah masa depan dari lembaga keuangan mikro di masa depan (Micu, Napoleon, 2010). Sedangkan Zeller dan Meyer (2002) mengemukakan bahwa indikator kinerja lembaga keuangan mikro dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu, kesinambungan keuangan (*financial sustainability*), keterjangkauan (*outreach*), dan dampak keberadaannya dalam sebuah lingkungan (*impact*). Ketiga kategori tersebut selanjutnya disebut dengan segitiga keuangan mikro (*the triangle of microfinance*).

Seperti yang terlihat pada Gambar 1 berikut ini, ketiga indikator saling terkait satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro akan mampu bertahan dan bersaing apabila memenuhi ketiga indikator tersebut. Lembaga keuangan mikro dalam memperluas jangkauannya sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga tersebut dalam menjaga *financial sustainability*. Apabila lembaga keuangan mikro tersebut mampu menjaga *financial sustainability* akan dapat memberikan *impact* terhadap perkembangan ekonomi lingkungan sekitarnya.



Gambar 1. Segitiga Keuangan Mikro

Sumber: Zeller & Meyer (2002)

Salah satu penilaian kinerja keuangan mikro di Indonesia adalah jangkauan (*outreach*), yang hingga saat ini masih sangat terbatas. Walaupun Indonesia memiliki beraneka ragam layanan jasa keuangan mikro, namun masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat penghasilan rumah tangga dan pengusaha mikro, dimana hanya sebagian saja yang dapat dilayani dan memiliki akses terhadap layanan keuangan mikro (*Promotion of Small Financial Institution/ProFI*, 2005).

Melihat hal tersebut, penting bagi lembaga keuangan mikro untuk memperhatikan ukuran jangkauannya (*outreach*) kepada usaha mikro/kecil dan masyarakat miskin. Menurut (Schreiner, 2002), pendekatan jangkauan atau *poverty approach* dapat dibedakan menjadi dua yaitu kedalaman jangkauan (*depth of outreach*) yang menunjukkan seberapa miskin masyarakat yang terbantu oleh layanan kredit, makin miskin masyarakat yang dibantu, makin dalam jangkauannya. Sementara keluasan jangkauan (*breadth of outreach*) menunjukkan seberapa banyak masyarakat miskin yang dapat dilayani dengan kredit mikro. Kedalaman jangkauan menjadi hal yang penting untuk diteliti karena proporsi masyarakat yang sangat miskin di Indonesia masih cukup tinggi.

Tabel 2. Keuangan Mikro - Hubungan Jangkauan

Atribut Umum	Hasil	Dampak Jangkaun
--------------	-------	-----------------

Komitmen untuk kemandirian keuangan	Pemulihan kembali biaya-bunga pinjaman	Jangkauan berkelanjutan (meningkatkan pelayanan)
Peningkatan efisiensi	Mengurangi biaya operasional dan biaya lainnya	Meningkatkan kedalaman Jangkauan
Fokus pada kebutuhan klien dan prefensi	Lebih berdasarkan pada permintaan, produk keuangan yang fleksibel	Memperbaiki ruang lingkup, luas dan kedalaman jangkauan
Bentuk formal dengan kegiatan yang lebih transparan	Akses ke sumber dana komersial	Peningkatan luas jangkauan
Meningkatnya persaingan	LKM bersaing untuk mempertahankan dan melanjutkan klien baru dengan masuk dan keluar pasar atau dengan memanfaatkan geografis (lokasi) baru	Peningkatan luas dan/atau kedalaman di luar jangkauan

Sumber: Charitonenko et al. (2004)

Secara umum jangkauan memiliki empat atribut umum yaitu (1) luas atau jumlah klien yang dilayani, (2) kedalaman atau sejauh mana orang miskin dilayani, (3) ruang lingkup atau berbagai produk yang ditawarkan, dan (4) keberlanjutan layanan atau permanen penyediaan layanan. Dimana luasnya jangkauan, merupakan pemahaman yang paling umum dari penjangkauan dan selalu diukur dengan jumlah klien yang dilayani berdasarkan produk dan layanan keuangan mikro. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa untuk memperluas jangkauan sangat ditentukan oleh keberadaan kebijakan yang tepat dan lingkungan peraturan yang mendukung perluasan jangkauan yang berkelanjutan Charitonenko et al. (2004).



Gambar 2. Enam Tingkat Jangkauan Pelayanan

Sumber : Schreiner, 2002

Sementara pendapat lainnya, membagi aspek keuangan mikro (Schreiner, 2002) menyarankan bahwa dualisme antara pendekatan kemiskinan dan pendekatan lembaga mungkin terlalu disederhanakan. Scheiner mengajukan kerangka analisis kompleks menggunakan enam aspek jangkauan: 1) manfaat bagi nasabah, 2) biaya bagi nasabah, 3) kedalaman, 4) keluasan, 5) keberlanjutan dan 6) ruang lingkup. Pendekatan Schreiner ini mendorong manajer keuangan mikro untuk memikirkan dimensi mana yang paling penting untuk lembaga keuangan mikro dan nasabahnya (Gambar 2).

Meskipun layanan keuangan mikro telah dinyatakan sebagai sarana yang efektif serta berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan, namun tetap harus diakui bahwa akses ke masyarakat miskin hingga saat ini masih kurang tercapai. Di Indonesia sendiri, untuk memperkuat layanan keuangan khususnya akses bagi masyarakat miskin telah lama dilakukan. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk melengkapi pelayanan terhadap keuangan mikro. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta, jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi hanya 108 juta. Hal ini menggambarkan bahwa akses menyeluruh terhadap jasa-jasa lembaga keuangan yang teregulasi masih belum dapat menjangkau seluruh masyarakat (SEEP Network, 2009)

Melihat pentingnya akses bagi masyarakat miskin diperlukan keberlanjutan keuangan agar mampu menjangkau orang miskin dalam jumlah besar. Kebanyakan orang miskin tidak bisa mengakses jasa keuangan karena kurangnya perantara keuangan yang kuat. Untuk membangun lembaga keuangan yang berkelanjutan diperlukan kemampuan penyedia keuangan mikro untuk menutupi seluruh biaya yang diperlukan. Kemampuan ini memungkinkan keberlanjutan operasional penyedia keuangan mikro dan penyediaan jasa keuangan yang terus menerus bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya transaksi, menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin serta menemukan cara-cara baru untuk menjangkau masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan mikro.

Selain akses ke lembaga keuangan mikro, sisi lain yang tak kalah penting adalah upaya yang dilakukan agar masyarakat miskin mampu mendapatkan penghasilan ataupun meningkatkan pendapatannya. Hal ini tentu perlu dilakukan mengingat kemajuan (*progress*) usaha yang dilakukan masyarakat miskin untuk merubah hidupnya perlu dibantu. Untuk itu, lembaga keuangan mikro perlu berkembang menjadi pengembangan usaha mikro melalui berbagai bentuk kebijakan dalam memajukan usaha mikro. Dengan adanya lembaga keuangan mikro diharapkan akan mampu berfungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Dengan memanfaatkan layanan dari keuangan mikro oleh

masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan akan mampu memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, program layanan keuangan mikro dirancang agar mampu menyentuh masyarakat miskin sesuai dengan target dan program yang telah dirancang. Program layanan keuangan mikro dirancang untuk memiliki dampak positif pada yang termiskin yang secara khusus berusaha untuk menjangkau masyarakat miskin melalui desain produk yang sesuai dengan penargetan (Wright, 2000). Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan Navajas *et al.* (2000), yang penting bukan hanya tercapainya lembaga keuangan mikro mencapai yang termiskin dari yang miskin, akan tetapi lebih kepada apakah lembaga keuangan mikro tersebut mencapai yang termiskin yang menuntut pinjaman dan kredit.

Menurut Karlan dan Zinman (2007), dalam mengevaluasi dampak dari peminjaman kredit bisa menjadi bias. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan masyarakat miskin melakukan pinjaman karena adanya “dorongan” tertentu daripada masyarakat miskin yang tidak melakukan pinjaman. Dengan membandingkan peminjam untuk non-peminjam akan menghasilkan perkiraan yang bias dari dampak kredit. Masalah ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, dimana lembaga keuangan mikro menjadi tempat untuk membantu keuangan mereka dalam menjalankan usahanya.

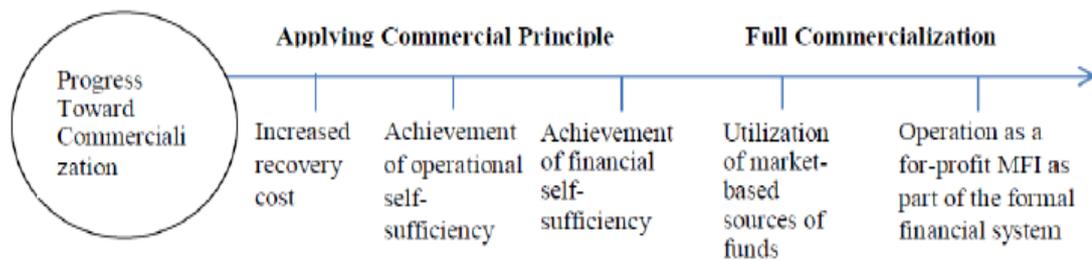
## **KEBERADAAN KEUANGAN MIKRO DALAM MEMUTUSKAN RANTAI KEMISKINAN**

Penyediaan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan memerlukan gabungan antara tujuan sosial dan tujuan komersial. Di satu pihak, kredit mikro berupaya untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan berbagai macam layanan keuangan, di lain pihak lembaga keuangan mikro tersebut juga mengupayakan adanya keuntungan agar dapat menampung tambahan modal sehingga mampu menjangkau lebih banyak orang. Hal ini tentu saja menjadi tekanan, apakah lembaga keuangan berupaya untuk menjangkau lebih banyak nasabah atau menghasilkan lebih banyak keuntungan. Karena keuntungan yang dapat dicapai oleh lembaga keuangan mikro juga sangat bergantung pada seberapa banyak masyarakat miskin yang dapat benar-benar membayar untuk layanan tersebut.

Tidak mudah mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Untuk menutupi biaya operasionalnya, lembaga keuangan mikro berusaha mencapai keberlanjutan usaha untuk menutup operasional usaha lembaga tanpa tergantung kepada lembaga donor dan pemerintah (Montgomery & Weiss 2011). Dengan demikian maka operasional lembaga keuangan mikro akan cenderung lebih bersifat komersil dan berorientasi kepada keuntungan (Charitonenko *et al.* 2004). Pada akhirnya, dengan adanya tuntutan

keberlanjutan usaha namun di sisi lain lembaga keuangan mikro juga dituntut harus merealisasikan misi sosialnya, terefleksikan pada jangkauan layanannya (*service outreach*) terhadap masyarakat miskin akan menimbulkan terjadinya *trade off* (Acharya & Acharya 2006; Nugroho 2009; Hermes *et al.* 2011; Hermes & Lensink 2011; Montgomery & Weiss 2011; Hartarska *et al.* 2013).

Dalam berbagai sumber disebutkan bahwa komersialisasi lembaga keuangan mikro lebih berdasarkan pada prinsip-prinsip pasar dalam operasinya. Prinsip *pro-pasar* ini berarti bahwa perluasan lembaga keuangan mikro membutuhkan operasi untuk lebih berorientasi pada keuntungan daripada berorientasi subsidi. Sebagai sebuah entitas yang berorientasi komersial, beberapa tahapan diperlukan untuk menjalani prinsip-prinsip tersebut (Charitonenko *et al.*, 2004).



Gambar 3. Ilustrasi Atribut Komersialisasi Lembaga Keuangan Mikro

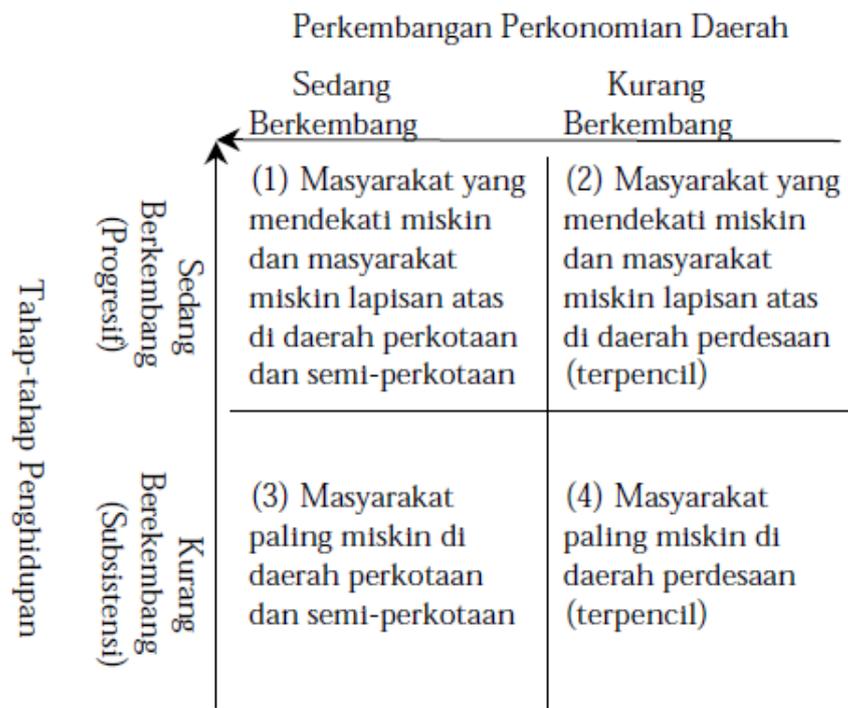
Sumber : (Charitonenko *et al.*, 2004).

Berdasarkan Gambar 3 tersebut diatas, terlihat bahwa terdapat empat tahapan komersialisasi lembaga keuangan mikro. Tahap pertama adalah mengadopsi operasional perbankan, misalnya dalam mengembangkan produk-produk keuangan dan menerapkan suku bunga pasar untuk menutupi semua biaya operasional. Tahap kedua dilakukan melalui pengembangan lembaga keuangan mikro mandiri melalui peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Kondisi di fase ini merupakan batu loncatan untuk tahap ketiga, yaitu tahap komersialisasi dimana dana publik bisa dimobilisasi. Dan pada fase ini lembaga keuangan mikro melakukan kegiatan investasi. Pada tahap keempat, lembaga keuangan mikro merupakan badan yang menguntungkan yang mana operasi keuangan dilakukan di bawah prinsip-prinsip kehati-hatian dan diatur. Dalam prakteknya, fase ini adalah fase komersialisasi yang dicapai dengan mengubah lembaga keuangan mikro menjadi bank komersial.

Berdasarkan hasil temuan Rhyne (1998) mengatakan bahwa untuk lembaga yang berkinerja baik, tidak ditemukannya korelasi antara tingkat kemiskinan nasabah dengan kesehatan keuangan kelembagaan. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan mikro memiliki tantangan untuk melayani lebih banyak masyarakat dengan pinjaman kecil dan menjangkau masyarakat yang lebih jauh di pelosok pedesaan. Hal

tersebut dapat dicapai dengan mengembangkan metode layanan yang disesuaikan dengan kondisi nasabahnya sehingga nasabah mampu membayar seluruh biaya jasa, membuat lembaga sehat secara finansial.

Untuk membedakan kondisi nasabah (klien) maka Usman *et al.* (2004), membedakan masyarakat miskin dan lapisan berpendapatan rendah dapat menjadi empat kategori: 1) masyarakat yang mendekati miskin dan masyarakat miskin lapisan atas yang hidup di daerah perkotaan dan semi-perkotaan; 2) masyarakat yang mendekati miskin dan masyarakat miskin lapisan atas yang hidup di daerah perdesaan (terpencil); 3) masyarakat paling miskin yang hidup di daerah perkotaan dan semi-perkotaan; 4) masyarakat paling miskin yang hidup di daerah perdesaan (terpencil) (Gambar 4). Sangat penting untuk dicatat bahwa proporsi dari masyarakat yang tidak terlalu miskin dan yang paling miskin tidak harus sama, demikian juga proporsi daerah yang termasuk dalam kategori sedang berkembang dan kurang berkembang.



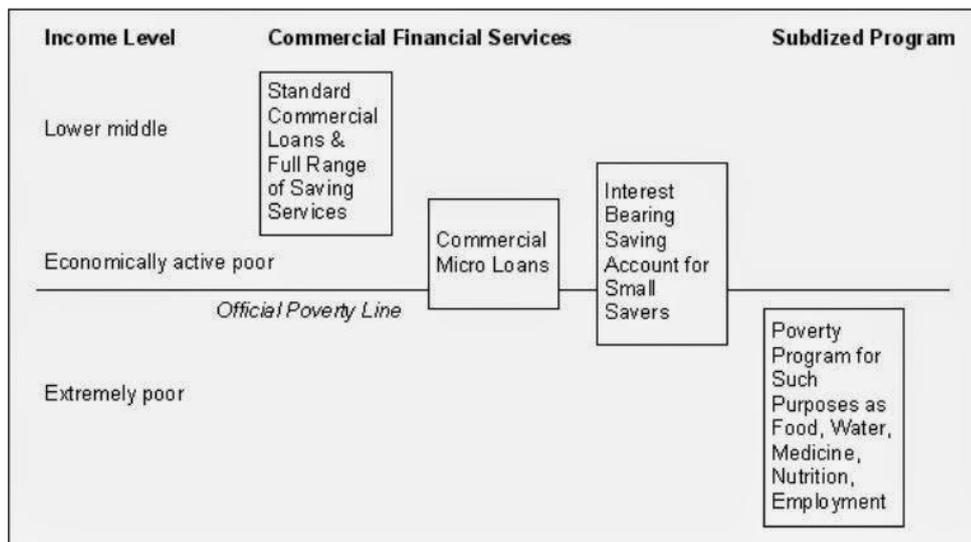
Gambar 4. Kategori Penghidupan Masyarakat Miskin

Sumber : Usman *et al.*, 2004

Berdasarkan kategori penghidupan masyarakat miskin, ditemukan bahwa penawaran layanan keuangan mikro berbeda-beda antar daerah. Akses golongan miskin terhadap berbagai penyedia layanan keuangan mikro berbeda-beda. Pelayanan keuangan formal umumnya sulit diakses masyarakat miskin karena konsentrasi pelayanan hanya di pusat perekonomian (urban), dan kebijakan pelayanan yang belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat miskin. Masyarakat yang mendekati miskin (agak miskin) dan masyarakat miskin lapisan atas (tidak terlalu miskin) dapat mengakses beberapa pelayanan keuangan mikro dari lembaga formal nonbank, lembaga nonformal, pelayanan keuangan mikro yang diberikan melalui program-program pemerintah dan

lembaga informal. Namun, golongan sangat miskin hanya dapat mengakses pelayanan dari beberapa program pemerintah dan lembaga informal serta rentenir (Usman *et al*, 2004).

Keuangan mikro pada umumnya diasosiasikan dengan modal kerja yang diinvestasikan untuk usaha atau kegiatan menghasilkan pendapatan (*income generating*) yang berjumlah kecil. Kredit usaha mikro merupakan bagian penting dalam layanan keuangan mikro karena masyarakat berpendapatan rendah memerlukan berbagai macam bentuk jasa keuangan. Dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin, perlu diperhatikan bahwa terdapat klasifikasi masyarakat miskin. Klasifikasi tersebut antara lain pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Secara skematis hal di atas dapat dilihat pada **Gambar 5** berikut.



Gambar 5. Pelayanan Keuangan dalam Pengentasan Kemiskinan

Sumber : Robinson, Marguerite S ( 2000)

Navajas *et al*. (2000) menyoroiti bahwa perlu adanya pengawasan lebih terhadap aliran dana yang dianggarkan untuk pinjaman bagi masyarakat termiskin. Oleh karena itu, jika melihat lebih jauh akan perdebatan tersebut maka perlu adanya perubahan bentuk layanan ke arah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat termiskin justru menjadi prioritas yang mendesak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbedabeda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan.

Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan usaha kecil dan menengah dengan para pelaku usaha menengah maupun besar.

Selain itu, muncul alasan lain mengenai mahal biaya untuk menjangkau golongan termiskin, yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah kredit dan tabungan mereka, sehingga tidak akan mampu menjamin keberlanjutan dan perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan mikro (*the microfinance gateway*). Pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu strategi yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada masyarakat yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif (Rudjito, 2003).

Golongan lainnya justru memberikan pandangan yang berbeda, dimana perlu adanya perubahan paradigma keuangan mikro dari fokus pada aspek promosi atau dukungan terhadap usaha ekonomi ke arah layanan keuangan mikro yang bersifat perlindungan melalui program tabungan, pinjaman darurat, atau asuransi mikro. Menurut golongan ini, tidak adanya permintaan terhadap pelayanan keuangan mikro lebih disebabkan oleh ketidaksesuaian antara bentuk layanan yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat termiskin.

Untuk itu, diperlukan pengembangan program pangan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Selain itu, didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi yang dikategorikan sebagai miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dibanyak negara berkembang, lembaga keuangan mikro masih terus dipandang sebagai sektor marjinal dan terutama menjadi kepedulian pengembangan untuk lembaga donor, pemerintahan, dan investor dengan tanggung jawab sosial. Lembaga keuangan mikro ini di klaim sebagai salah satu cara yang cukup ampuh untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses pada lembaga mikro yang ada. Selain itu layanan keuangan mikro yang ada saat ini, jangkauannya masih sangat terbatas dan bahkan mungkin belum menyentuh kelompok masyarakat yang termiskin dari yang miskin. Hal ini tentunya

membuat tujuan utama keuangan mikro yaitu mengentaskan kemiskinan menjadi terhambat. Karena dengan keterbatasan modal yang ada serta tersendatnya pengembalian pinjaman dari masyarakat miskin membuat terjadinya *trade-off* antara keinginan untuk komersialisasi maupun untuk kegiatan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Acharya YP, Acharya U. 2006. *Sustainability of Microfinance Institution from Small Farmer's Persepective: a. Case of Rural Nepal*. International Review of Business Research Papers. 2(2): 117-126.
- Charitonenko, Stephanie, Anita Campion, and Nimal Fernando. 2004. *Commercialization of Microfinance: Perspectives from South and Southeast Asia*. Manila: ADB
- Hartarska V, Shen X, Mersland R. 2013. *Scale Economies and Input Price Elasticities in Microfinance Institutions*. Journal of Banking & Finance. 37(1): 118-131. <http://doi.org/7fs>
- Hermes N, Lensink R. 2011. *Microfinance: Its Impact, Outreach, and Sustainability*. World Development. 39(6): 875-881. <http://doi.org/dx8br7>
- Hermes N, Lensink R, Meesters A. 2011. *Outreach and Efficiency of Microfinance Institutions*. World Development. 39(6): 938-948. <http://doi.org/fsvdbb>
- Karlan, Dean and Jonathan Zinman. 2007. *Expanding Credit Access: Improving Microfinance Operations and Measuring Impact with Credit Scoring*. BASIS Brief 2007-09. Madison, WI: USAID/University of Wisconsin.
- Ledgerwood, J. 1998. *Microfinance handbook: An Institutional and Financial Perspective, Sustainable banking for The Poor*. <http://www.worldbank.org> (Washington, DC, World Bank).
- Micu, Napoleon P. 2010. *State of the Art of Microfinance: A Narrative*. In partnership with PinoyY ME Foundation, Ninoy and Cory Aquino Foundation, and Hanns Seidel Foundation/Germany.
- Navajas, Sergio. Mark Schreiner, Richard L. Meyer, Claudio Gonzalez-Vega, and Jorge Rodriguez-Meza. 2000. *Microcredit and the Poorest of the Poor: Theory and Evidence From Bolivia*. World Development. 28 (2).  
[http://www.microfinance.com/English/Papers/Bolivia\\_Poorest.pdf](http://www.microfinance.com/English/Papers/Bolivia_Poorest.pdf)
- Nugroho AE. 2009. *The Commercialization-Outreach Nexus of Microfinance in Indonesia: The Case Study of Microfinance Industry in Boyolali, Central Java*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. 17(2): 55-64.
- Promotion of Small Financial Institution (ProFI)*. 2005. *Indonesia, Background Paper on Microfinance Policy and Strategy*, di akses dari [www.profi.or.id](http://www.profi.or.id) pada tanggal 2 Juli 2016.
- Rajivan, Anuradh. 2003. *Credit and Women's Empowerment: A Case Study Of SML (SHARE Microfinance Ltd.)*. United Nations Development Program (UNDP) DRAF, di akses dari <http://www.undp.org.in/report/wkpsclmblizn/casestudyofsml.htm> tanggal 22 Juli 2016.

- Robinson, Marguerite S. 2000. *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for The Poor*. The World Bank and Open Society Institute ,Washington, D.C.
- Rudjito. 2003. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Menanggulangi Kemiskinan Studi Kasus: Bank Rakyat Indonesia*. Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 1, Maret 2003, Jogjakarta. Di akses dari <http://www.ekonomirakyat.org> tanggal 15 juli 2016.
- Rhyn. 1998. *The Yin and Yang of Microfinance: Reach the Poor and Sustainability*. Micro Banking Bulletin No.2.
- SEEP Network. 2009. *Laporan Industri Keuangan Mikro Indonesia*. Banking with the Poor Network. Jakarta.
- Schreiner, Mark. 2002. *Aspects of Outreach: A Framework for A discussion of The Social Benefits of Microfinance*. Journal of International Development, Vol. 14, pp 1-13.
- Usman S, Suharyo W I, Sulaksono B, Mawardi M S, Toyamah N dan Akhmadi. 2004. *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin : Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
- Wahyudin, Didin. 2004. *Key Succes Factors In MicroFinancing*. Paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: “Future Perspective for Indonesian Market”, Jakarta, 7 Desember 2004
- Wright, Graham A. N. 2000. *Microfinance Systems: Designing Quality Financial Services for the Poor*. Zed Books Ltd. London & New York, and The University Press Limited, Dhaka.
- Zeller, M. & Meyer, R. (Eds.). 2003. *The Triangle of Microfinance. Financial ustainability, Outreach, and Impact*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.